

**PERAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PENGEMBANGAN  
PETERNAKAN AYAM PETELUR  
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

Iyan Syahputra I.K Kunub  
NPP. 32.1054

*Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua  
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [iynsyhptr@gmail.com](mailto:iynsyhptr@gmail.com)

Dosen Pembimbing Skripsi: Abdurohim, S.Sos., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement:** *The potential for developing layer chicken farming in Biak Numfor Regency is substantial and strategic in supporting food security and the local economy. However, there are various challenges faced by layer chicken farmers, including limited access to capital, technology, training, and suboptimal government support. These issues have led to egg production not yet reaching self-sufficiency, resulting in continued dependence on supplies from outside the region. Additionally, the high cost of poultry production inputs especially feed combined with the fluctuating market prices of poultry products makes it difficult for farmers to manage profits. Other obstacles include limited infrastructure, low human resource quality, and ongoing threats of infectious diseases among livestock.*

**Purpose:** *This study aims to identify and describe the role of the Agriculture and Food Security Office of Biak Numfor Regency in the development of layer chicken farming in the region..* **Method:** *This research was conducted based on Arsyad's Role of Government Theory with descriptive qualitative research type and data collection using observation, interview, and documentation methods. Data collection techniques were carried out by collecting data, presenting data, and reducing data, and verifying data.* **Result:** *The results showed that the role of the agency in providing assistance for livestock facilities and infrastructure had a good impact in improving the welfare of the farming community by providing assistance for livestock facilities and infrastructure so that it was more optimal and motivated in the process of raising livestock with optimal results. However, there are obstacles such as the absence of regulations as the basis for strong layer farming activities and problems in providing assistance for livestock facilities and infrastructure and livestock activities so that the development of layer farming has not run optimally.* **Conclusion:** *The role of the agency in the development of layer farming has been running well. This is due to the good collaboration of the office, poultry farmer associations, and farmer communities. To improve the development of layer farms, it is recommended to make regulations or local regulations governing layer farming activities and create new strategies in developing farms, provide regular farm management training to farmers, and expand cooperation with various parties to improve the progress of layer farms in Biak Numfor District.*

**Keywords:** *Development, Empowerment, Community, Layer Farming Biak Numfor*

**ABSTRAK**

**Permasalahan:** Potensi pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor sangat besar dan strategis dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian lokal namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh peternak ayam petelur, termasuk keterbatasan akses modal, teknologi, pelatihan, serta dukungan pemerintah yang belum optimal. Hal ini menyebabkan produksi telur ayam belum mencapai tingkat swasembada, sehingga masih terjadi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Tingginya harga sarana produksi peternakan ayam petelur, terutama pakan, sementara harga jual produk peternakan cenderung fluktuatif, yang menyulitkan peternak dalam mengelola keuntungan. Selain itu, masih ditemukan kendala seperti terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih adanya ancaman penyakit menular pada ternak.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

**Metode:** Penelitian ini dilakukan berdasarkan Teori Peran Pemerintah menurut Arsyad dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis pengambilan data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan reduksi data, dan verifikasi data.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana peternakan berdampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan sehingga lebih optimal dan termotivasi dalam proses beternak dengan hasil yang optimal. Akan tetapi adanya kendala seperti ketiadaan regulasi sebagai dasar kegiatan peternakan ayam petelur yang kuat serta permasalahan dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana peternakan serta kegiatan peternakan sehingga pengembangan peternakan ayam petelur belum berjalan dengan maksimal.

**Kesimpulan:** Peran dinas dalam pengembangan peternakan ayam petelur telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari dinas, asosiasi peternak unggas, serta masyarakat peternak. Guna meningkatkan pengembangan peternakan ayam petelur, disarankan untuk membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan peternakan ayam petelur serta membuat strategi baru dalam mengembangkan peternakan, memberikan pelatihan manajemen peternakan secara rutin kepada peternak, dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemajuan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

**Kata kunci:** Pengembangan, Pemberdayaan, Masyarakat, Peternakan Ayam Petelur Biak Numfor

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peternakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan hewan, yang nantinya akan mendapatkan hasil seperti daging, susu, telur, dan hasil produksi lainnya yang bernilai jual dan dapat dimanfaatkan. Peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi sumber gizi protein hewani masyarakat, memenuhi kebutuhan dan menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak, serta memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat. Adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan, menjadi salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan kegiatan peternakan masyarakat. Peraturan menteri di atas sesuai dengan salah satu arah kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia

Tahun 2020-2024, yaitu peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dengan pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan, yang difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional.

Sebagai salah satu industri pertanian yang paling penting, peternakan ayam petelur memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Peternak ayam petelur dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dengan memberikan akses modal, pelatihan teknis, dan teknologi yang lebih canggih. Hal ini juga memberi peternak kecil kesempatan untuk mengembangkan bisnis pribadi dan bersaing di pasar yang lebih luas. Karena ayam dan telur merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat, upaya ini dapat memperkuat sektor peternakan yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Penelitian terbaru oleh Sumiati, et al (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan sektor peternakan unggas di Indonesia sangat bergantung pada adaptasi terhadap tantangan, seperti larangan penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan. Strategi keberlanjutan kini mencakup pemanfaatan teknologi, peningkatan regulasi, dan penguatan kapasitas peternak.

Di sisi lain, skala rumah tangga juga memegang peran vital dalam sistem pangan lokal. Penelitian oleh Silondae, et al (2022) mengenai peran peternakan ayam kampung skala rumah tangga di Minahasa menunjukkan bahwa usaha peternakan kecil dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan, selama faktor-faktor seperti jenis, ukuran, dan lokasi usaha diperhatikan secara optimal. Temuan ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya lokal dalam meningkatkan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Sektor peternakan juga menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Papua. Hal ini disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 yang menyebutkan bahwa “Untuk mencapai Visi Papua Mandiri dari Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023, dilaksanakan dengan mendorong sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata”. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang aktif dalam pengembangbiakan dan pemanfaatan ayam petelur sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan, selain hewan ternak lain seperti sapi, kambing, dan babi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah penduduk yang memilih membudidayakan ayam ras petelur sebagai usaha ternak masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah yang mendukung pengembangan budidaya ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat asli Papua.

Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2023, terdapat sekitar 71 keluarga yang secara khusus membudidayakan ayam petelur dengan Kabupaten Biak Numfor sebagai kabupaten yang memiliki jumlah usaha rumah tangga peternakan ayam petelur terbanyak di antara kabupaten lainnya di Provinsi Papua sebanyak 32 usaha rumah tangga yang dimiliki. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam sektor peternakan unggas di Provinsi Papua dan juga Kabupaten Biak Numfor yang menunjukkan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya ayam petelur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan lokal maupun sebagai peluang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu memandang potensi ini sebagai peluang strategis yang menjanjikan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pengembangan sektor ini. Sejalan dengan hal ini, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Nomor: 520/433.d/2019 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023, dikeluarkan sebagai salah satu peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan pertanian dan peternakan, yang dalam hal ini yaitu pengembangan peternakan ayam petelur. Peran ini dilakukan dengan memberdayakan peternak ayam sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi peternak selama kegiatan peternakan ayam, khususnya pada peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

Dengan adanya pengembangan peternakan ayam petelur, Kabupaten Biak Numfor dapat menjadi daerah yang memiliki ketersediaan pangan dan ketahanan pangan khususnya pada ketersediaan telur ayam. Keberhasilan pengembangan peternakan ayam yang berdampak pada peningkatan produksi telur dapat menjadi salah satu upaya mencapai kondisi swasembada telur ayam sehingga Kabupaten Biak Numfor tidak lagi mengimpor telur ayam dari luar daerah. Ketika kebutuhan akan telur ayam dalam daerah sudah bisa terpenuhi dengan baik, maka hasil produksi telur yang berlebih dapat diekspor kepada daerah lain yang ada di sekitar Kabupaten Biak Numfor. Kondisi ini tentu saja dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga para peternak untuk mengembangkan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penulis berfokus pada permasalahan tingginya harga sarana produksi peternakan ayam petelur, terutama pakan, sementara harga jual produk peternakan cenderung fluktuatif, yang menyulitkan peternak dalam mengelola keuntungan. Selain itu, masih ditemukan kendala seperti terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih adanya ancaman penyakit menular pada ternak. Meskipun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor telah menjalankan perannya melalui penyuluhan, pelatihan, dan bantuan sarana peternakan, tantangan di lapangan masih cukup kompleks dan beragam.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Kabupaten Biak Numfor menghadapi masalah serius terkait tingginya biaya pakan, keterbatasan fasilitas pengolahan dan pemasaran, rendahnya kapasitas SDM peternak, serta penyakit ternak yang mengganggu keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih tepat dan menyeluruh dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta ketahanan peternakan ayam petelur di daerah ini.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti permasalahan yang relevan, namun belum secara spesifik membahas konteks lokal di Biak Numfor. Penelitian oleh Anang & Kadir, (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan produksi sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan input seperti pakan konsentrat, tenaga kerja, pengalaman peternak, dan vaksinasi yang tepat. Meskipun hasil ini memberikan gambaran penting mengenai faktor produksi, konteks geografis dan tantangan sosial-ekonomi di Biak Numfor tentu berbeda, sehingga temuan tersebut belum bisa dijadikan acuan langsung untuk pengambilan kebijakan lokal. Sementara itu, penelitian oleh Alarcon et al.,(2017) menekankan pentingnya manajemen kesehatan ternak dan penguatan kepercayaan antara peternak dan pemerintah dalam pengelolaan peternakan, terutama pada skala kecil. Studi ini menunjukkan bahwa kurangnya tenaga terlatih dan tidak optimalnya peran pemerintah menjadi penghambat dalam pengendalian penyakit dan peningkatan produksi. Walaupun penelitian ini dilakukan dalam konteks perkotaan di Kenya, tantangan seperti kurangnya akses layanan veteriner dan rendahnya kepercayaan peternak juga ditemukan dalam skala berbeda di Biak Numfor.

Dengan demikian, kesenjangan yang muncul adalah belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan peternakan ayam petelur secara komprehensif di Kabupaten Biak Numfor, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga, peningkatan kapasitas peternak, dan pengendalian penyakit. Penelitian ini menjadi penting sebagai dasar

perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang kontekstual dan berkelanjutan, agar Kabupaten Biak Numfor mampu mencapai swasembada telur ayam serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

Mengacu pada kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menjawab permasalahan ini, tidak hanya melalui bantuan fisik, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas peternak secara berkelanjutan agar produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor dapat ditingkatkan secara nyata. Dengan adanya pengembangan peternakan ayam petelur, Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat menjadi daerah yang memiliki ketersediaan pangan dan ketahanan pangan khususnya pada ketersediaan telur ayam. Keberhasilan pengembangan peternakan ayam yang berdampak pada peningkatan produksi telur dapat menjadi salah satu upaya mencapai kondisi swasembada telur ayam sehingga Kabupaten Biak Numfor tidak lagi mengimpor telur ayam dari luar daerah. Ketika kebutuhan akan telur ayam dalam daerah sudah bisa terpenuhi dengan baik, maka hasil produksi telur yang berlebih dapat diekspor kepada daerah lain yang ada di sekitar Kabupaten Biak Numfor. Kondisi ini tentu saja dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan juga para peternak untuk mengembangkan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran pemerintah maupun konteks pemberdayaan peternak ayam petelur masyarakat. Penelitian Lestari dan Maimunah berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur DI Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Lestari & Maimunah*, (2023) menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan bahwa variabel jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan luas kandang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi telur di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian Rahmawati, et al menemukan bahwa peran, kinerja dan inovasi penyuluh berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keberdayaan peternak ayam ras petelur di Kabupaten Jember (Rahmawati et al., 2016) Penelitian menemukan bahwa strategi yang dihasilkan mampu meningkatkan produksi ayam ras petelur agar menghasilkan telur yang berkualitas, pengembangan pasar keluar daerah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar (Ahmad et al., 2023). Penelitian Djamaluddin et al., (2020) menemukan bahwa terdapat peran Pemerintah Desa Tanete dalam membuat kebijakan untuk kebijakan menciptakan iklim usaha peternakan ayam petelur yang kondusif meliputi pemberian kesempatan yang setara bagi semua calon pelaku usaha, kemudahan dalam proses perizinan yang sejauh ini tidak mengalami penolakan, terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui dukungan asosiasi perunggasan, serta terjaminnya kesehatan ternak berkat kerja sama dengan dinas peternakan dan mitra usaha dalam pengelolaan biosekuriti. Penelitian Suwannasri & Promphakping, (2022) menunjukkan bahwa peternakan ayam petelur di Ban Klang telah berlangsung lebih dari 40 tahun dengan praktik berkelanjutan, seperti pertanian padi tradisional, penggunaan bahan lokal untuk kandang, manajemen pakan dan pupuk, distribusi produk, serta dukungan dari konsumen lokal. Studi ini merekomendasikan agar peternak mengembangkan usaha mereka sejalan dengan prinsip peternakan organik dan menjalin kerja sama investasi dengan pemerintah serta pelaku usaha lokal. Terdapat juga penelitian oleh Onono et al., (2018) yang menunjukkan tantangan dalam produksi yang meliputi pakan berkualitas rendah, keterbatasan lahan, masalah keamanan, penyakit, dan minimnya informasi manajemen ayam. Meskipun peternakan ayam petelur membantu ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan, sistem ini masih rentan terhadap masalah penyakit dan keamanan pangan yang perlu diatasi melalui penelitian dan penyuluhan. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam sektor perkebunan di daerah lain. Penelitian oleh Anggraini, et al (2022) mengenai pemberdayaan petani kelapa

sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani, ketidakstabilan harga jual, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kepercayaan antaranggota kelompok tani menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa permasalahan struktural seperti kapasitas SDM yang rendah dan kurangnya dukungan infrastruktur merupakan tantangan umum dalam upaya pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Selanjutnya (Pingali & Rosegrant, 1995) menjelaskan bahwa proses komersialisasi dalam sektor pertanian termasuk peternakan merupakan bagian dari dinamika pembangunan ekonomi yang didorong oleh kekuatan pasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa transisi dari sistem pertanian subsisten ke arah spesialisasi seperti peternakan ayam potong bukanlah proses yang tanpa tantangan. Terdapat konsekuensi terhadap kesetaraan dan lingkungan yang harus dikelola melalui kebijakan publik yang tepat, seperti investasi dalam infrastruktur pedesaan dan peningkatan kualitas penyuluhan.

Dalam konteks produksi unggas skala kecil, ulasan oleh Wong et al., (2017) menyatakan bahwa sistem ini sangat penting di daerah miskin dan rawan pangan. Sistem ini menyediakan sumber pendapatan serta pangan bergizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Namun, tantangan utama dalam sistem ini meliputi penyakit, pemangsaan, fluktuasi harga pakan, dan lemahnya biosekuriti. Oleh karena itu, peran penyuluhan pertanian dan jaringan kesehatan hewan masyarakat menjadi krusial untuk meningkatkan kontribusi sistem ini terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Vaarst et al., (2015) menyoroti bahwa keberlanjutan dalam peternakan unggas mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola kelembagaan. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan sistem untuk memahami keberlanjutan produksi unggas yang seringkali terabaikan dalam diskusi global tentang sistem pangan. Produksi ayam potong, meskipun efisien dalam konversi pakan dan memiliki jejak lingkungan yang relatif kecil, tetap harus memperhatikan isu-isu seperti kesejahteraan hewan, keseimbangan ekosistem, dan keadilan sosial bagi para pelakunya. Studi kuantitatif oleh Elahi et al., (2024) di China membahas keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Leading Areas for Agricultural Green Development (LAGD). Studi ini menunjukkan bahwa emisi pencemaran dari sektor peternakan, termasuk unggas, mengalami penurunan setelah 2014 berkat efisiensi produksi dan kebijakan pengendalian polusi yang efektif. Namun, perubahan struktur industri dan tekanan ekonomi tetap menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan. Temuan ini relevan dalam menunjukkan perlunya kebijakan yang menyelaraskan pertumbuhan industri dengan perlindungan lingkungan dalam sektor peternakan.

Dalam konteks lokalitas genetik dan adaptasi lingkungan, Bettridge et al., (2018) menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam pengembangan ayam kampung. Studi ini menunjukkan bahwa ayam kampung memiliki keragaman genetik yang tinggi dan kemampuan adaptasi terhadap tekanan lingkungan serta sosial-ekonomi yang bervariasi. Oleh karena itu, intervensi pengembangan peternakan ayam kampung harus mempertimbangkan preferensi budaya, dinamika pasar lokal, serta tantangan ekologi dan parasitologis yang berbeda antarwilayah. Sementara itu, studi oleh Henderson, (2005) di Australia mengkaji konflik penggunaan lahan antara peternakan unggas dan ekspansi perkotaan. Penelitian ini menemukan bahwa relokasi peternakan unggas ke daerah pedesaan yang lebih terpencil menghadapi hambatan besar, seperti sistem perencanaan tata ruang, biaya relokasi, dan ketergantungan ekonomi luar peternakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan sistem regulasi, konflik antara kepentingan urban dan pertanian akan terus meningkat. Kumar et al., (2021) dalam kajiannya tentang peternakan unggas di India menegaskan pentingnya peternakan unggas pekarangan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan. Produksi ayam dalam skala rumah tangga terbukti memberikan manfaat ekonomi dan gizi yang signifikan, meskipun

menghadapi kendala seperti tingginya angka kematian anak ayam, kurangnya pengetahuan teknis, serta fluktuasi harga pakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pengembangan varietas ayam unggul lokal serta pelatihan teknis bagi peternak.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya dalam mengkaji secara langsung peran Dinas dalam pengembangan peternakan ayam petelur. Melalui pengelompokan dan analisis terhadap delapan jurnal terbaru, terlihat bahwa masing-masing studi memiliki sudut pandang dan pendekatan yang beragam, namun belum secara spesifik membahas aspek kelembagaan pemerintah daerah dalam mendukung peternakan ayam petelur. Penelitian oleh Anggraini et al. (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan petani kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pengetahuan dan kurangnya kepercayaan antar anggota kelompok tani. Meski terdapat kesamaan dalam hal keterlibatan dinas, penelitian ini berbeda dari segi komoditas dan belum menyentuh secara rinci aspek regulasi dan distribusi bantuan yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Pingali & Rosegrant (1995) menempatkan proses komersialisasi pertanian sebagai bagian dari dinamika pembangunan ekonomi yang lebih luas. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan publik dalam mengelola dampak transisi dari sistem subsisten ke spesialisasi. Meskipun sejalan secara konseptual, penelitian ini bersifat makro dan tidak membahas peran aktor lokal seperti Dinas Peternakan secara spesifik, sebagaimana diteliti dalam konteks lokal penelitian ini. Studi oleh Wong et al. (2017) memperlihatkan pentingnya sistem unggas skala kecil bagi ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat rentan. Penekanan utamanya adalah pada tantangan teknis dan biosekuriti. Dalam hal ini, penelitian ini memperluas diskusi Wong dengan menambahkan dimensi kelembagaan, yakni bagaimana distribusi bantuan dan ketiadaan regulasi memengaruhi kelangsungan usaha peternakan ayam petelur. Sementara itu, Vaarst et al. (2015) mengangkat isu keberlanjutan dalam peternakan unggas dari perspektif sistemik, termasuk dimensi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Penelitian ini bersinggungan dengan temuan penelitian ini dalam hal pentingnya tata kelola kelembagaan, namun tidak secara spesifik mengulas peran dinas sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran lebih konkret tentang bagaimana kelemahan regulatif memengaruhi efektivitas program bantuan di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan lingkungan, Elahi et al. (2024) menyoroti keberhasilan Tiongkok dalam menurunkan polusi dari peternakan melalui pendekatan efisiensi dan kebijakan pengendalian. Fokusnya adalah keseimbangan antara pertumbuhan industri dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menawarkan perspektif pelengkap dengan menggarisbawahi bahwa kebijakan lokal yang tidak berpijak pada regulasi kuat dapat menghambat pengembangan peternakan ayam secara berkelanjutan. Bettridge et al. (2018) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis lokal dalam pengembangan ayam kampung, dengan memperhatikan keragaman genetik dan adaptasi terhadap lingkungan. Fokus pada aspek biologis dan ekologi membedakan penelitian tersebut dari penelitian ini yang menekankan pada intervensi kelembagaan serta pentingnya bantuan formal dari dinas untuk mendukung peternak ayam petelur. Henderson (2005) mengkaji konflik lahan antara peternakan unggas dan ekspansi urban di Australia, dengan menyoroti lemahnya perencanaan tata ruang. Meski berbeda dalam konteks geografis dan permasalahan utama, terdapat irisan dalam hal pentingnya keberadaan regulasi yang kuat sebagai landasan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program, sebagaimana yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Kumar et al. (2021) membahas peternakan unggas pekarangan di India dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan pemberdayaan perempuan. Meski relevan dalam aspek pemberdayaan dan peran peternakan rakyat, fokus utamanya adalah pada manfaat ekonomi dan sosial mikro. Penelitian ini memperluas ruang diskusi dengan menambahkan analisis mengenai hambatan

struktural seperti regulasi dan mekanisme distribusi bantuan yang menjadi penghambat utama dalam pengembangan peternakan ayam petelur.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran dinas, faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor penghambat Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dalam pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

## **II. METODE**

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alami, bukan dalam situasi buatan seperti eksperimen. Penelitian ini berlandaskan pada pandangan filsafat postpositivisme, yang melihat bahwa kenyataan sosial itu kompleks dan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan angka. Dalam metode ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menginterpretasi data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hasilnya lebih akurat (Nurdin & Hartati, 2019:173).

Menurut Simangunsong (2017:230), data penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, survei, atau kegiatan lapangan lainnya untuk menjawab rumusan masalah. Sementara itu, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti laporan, arsip, buku, jurnal, atau data statistik yang telah dipublikasikan sebelumnya, yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 7 Januari hingga 22 Januari. Peneliti melakukan wawancara terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Seksi Produksi, Ketua dan Sekretaris Asosiasi Peternak Unggas, serta peternak ayam petelur pemilik kandang percontohan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena beliau membidangi secara langsung program pengembangan peternakan ayam petelur.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka secara langsung dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penerimaan program yang menjadi fokus penelitian. Alasan penggunaan informan ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam, relevan, dan kontekstual, yang tidak dapat diperoleh dari sumber data umum. Para informan memiliki kapasitas dan pengalaman yang dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai peran dinas dalam pengembangan peternakan ayam petelur di wilayah tersebut. Analisis penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Subandi (2011:119-120), yang membagi peran pemerintah ke dalam empat dimensi, yaitu: peran sebagai entrepreneur (wirausaha), peran sebagai koordinator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai stimulator. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam menelaah bagaimana peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijalankan dalam konteks pengembangan peternakan ayam petelur. Analisis data dilakukan secara induktif, artinya peneliti menyusun pola dan kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dari suatu peristiwa atau gejala sosial, bukan pada upaya untuk membuat generalisasi yang berlaku luas. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:243) melalui proses triangulasi data dan mencakup tiga tahapan utama, yaitu: a) Reduksi data, b) Penyajian data, dan c) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahapan ini berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan selama

proses penelitian berlangsung, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor menggunakan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Subandi (2011:119-120) dengan empat dimensinya yaitu, peran sebagai entrepreneur (wirausaha), peran sebagai koordinator, peran sebagai fasilitator, dan peran sebagai stimulator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Peran Sebagai *Entrepreneur***

Menurut Arsyad dalam Subandi (2011:119-120), Peran pemerintah sebagai Entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis terutama dalam mengelola aset-aset daerah secara ekonomis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan penting dalam pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor dengan mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program pengembangan peternakan seperti pelatihan, pemberian bantuan teknis, dan penguatan kelembagaan peternak di tingkat lokal. Pendekatan ini tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat peternak, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, diharapkan usaha peternakan ayam petelur menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan daerah sendiri.

#### **1. Pengembangan Sumber Daya Lokal**

Pengembangan sektor peternakan, khususnya peternakan ayam petelur, tidak hanya bergantung pada dukungan teknis dan modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam hal ini, keberhasilan program pengembangan peternakan sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber daya lokal dapat diidentifikasi, diberdayakan, dan diintegrasikan ke dalam proses produksi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan dan program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat serta meningkatkan produktivitas usaha peternakan. Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam pengembangan ini adalah bagaimana sumber daya lokal dapat dikelola secara efektif,

Pengembangan sumber daya lokal, khususnya dalam sektor peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sangat menonjol sebagai entrepreneur yang tidak hanya mengelola aset daerah secara ekonomis, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Pandemi Covid-19 menjadi titik balik kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya telur, serta menjadi momentum untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam sektor peternakan. Dengan kata lain, pengembangan peternakan ayam petelur tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan impor, dan menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

#### **2. Inovasi dan Pengambilan Risiko**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberanian untuk memulai pengembangan peternakan yang sebelumnya jarang ditekuni oleh masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam usaha peternakan ayam petelur, meskipun sektor ini belum familiar di kalangan mereka. Meskipun langkah ini

menghadirkan tantangan dan risiko, keberanian untuk memulai menjadi kunci dalam menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan masyarakat setempat.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor memiliki peran vital dalam hal tersebut. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha peternakan ayam dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan, lembaga ini diharapkan dapat mengimplementasikan program-program prioritas sub sektor peternakan dalam mendukung kegiatan peternakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023, yaitu: 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2. Program Peningkatan Hasil Peternakan. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Bentuk capaian dari pengembangan peternakan ayam petelur ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Produksi Telur Komoditas Unggulan Peternakan**  
**Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023**

| No | Komoditas    | Produksi Telur (Kg) |           |           |
|----|--------------|---------------------|-----------|-----------|
|    |              | 2021                | 2022      | 2023      |
| 1. | Ayam Kampung | 47.698              | 46.675    | 35.300    |
| 2. | Ayam Petelur | 1.084.612           | 1.720.800 | 1.765.000 |
| 3. | Itik         | 10.230              | 10.167    | 8.450     |
| 4. | Puyuh        | 17.640              | 17.650    | 14.000    |

Sumber: LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Bentuk capaian dari pengembangan peternakan ayam petelur ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah produksi telur ayam petelur. Produksi telur pada tahun 2022 mencapai 1.720.800 kg dan meningkat lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya 1.084.612 kg atau pencapaian peningkatan sebesar 58,7%. Peningkatan produksi telur juga meningkat pada tahun 2023 namun tidak sebesar pada tahun 2022 yang memiliki hasil produksi sebesar 1.765.000 kg atau mengalami peningkatan sebesar 2,6% pada tahun 2023.

### **3.2. Peran Sebagai Koordinator**

Menurut Arsyad dalam Subandi (2011:119-120), Koordinator yaitu pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi untuk pembangunan di daerahnya. Pengembangan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor memerlukan kerja sama yang efektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Sebagai koordinator, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan peternakan ayam petelur. Sebagai koordinator, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Peternak Unggas dan Badan Karantina Nasional Wilayah Kabupaten Biak Numfor. Koordinasi ini bertujuan untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan ayam petelur.

#### **1. Koordinasi dengan Stakeholder terkait**

Pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam mendukung program tersebut. Stakeholder

yang terlibat antara lain peternak lokal, lembaga keuangan, penyedia pakan dan bibit unggul, serta masyarakat luas yang menjadi bagian dari rantai pasok produksi peternakan. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak ini memungkinkan tercapainya sinergi dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Koordinasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Asosiasi Peternak Unggas dan Badan Karantina Wilayah telah berjalan efektif dalam mendukung pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor. Melalui koordinasi ini, kegiatan pelatihan, pengawasan, dan pemeriksaan penyakit hewan unggas dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan ayam petelur, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat peternak di Kabupaten Biak Numfor.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum memiliki kerja sama yang intensif dengan dinas lain di Kabupaten Biak Numfor dalam pengembangan peternakan ayam petelur. Meskipun ada kerja sama terbatas dengan Dinas Koperasi dan UMKM, namun kerja sama ini masih terbatas pada pertukaran data dan belum mencakup kegiatan yang lebih luas.

Meskipun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak melakukan kerja sama dengan dinas lain di Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan program pengembangan peternakan ayam petelur, namun dinas tetap berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan ayam petelur di daerah tersebut. Dinas akan terus berupaya untuk mencari solusi dan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengembangan peternakan ayam petelur, meskipun tanpa kerja sama dengan dinas lain.

## **2. Sinkronasi Program dan Kebijakan**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memastikan bahwa program pengembangan peternakan ayam petelur sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun secara matang dan disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dengan demikian, program pengembangan peternakan ayam petelur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mendukung tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat peternak. Selain itu, dinas juga berkoordinasi dengan Asosiasi Peternak Unggas dan Badan Karantina, serta melakukan kerja sama terbatas dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

Namun, meskipun perencanaan program sudah dilakukan dengan cukup baik, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa peran dinas dalam sinkronisasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kegiatan peternakan lokal, belum terlaksana secara optimal. Hingga saat ini belum terdapat regulasi atau peraturan daerah yang secara resmi mengatur kebijakan pembatasan impor telur dari luar daerah ke Kabupaten Biak Numfor. Tidak adanya regulasi ini menjadi tantangan tersendiri, karena dapat memicu persaingan yang tidak sehat antara produk lokal dan produk impor, yang pada akhirnya mengurangi daya saing telur lokal dan menghambat peningkatan kesejahteraan peternak. Aturan yang ada saat ini hanya sebatas Surat Edaran Bupati Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021, yaitu Surat Edaran Bupati Nomor 44.4/109 tentang Mempertahankan Papua Bebas Penyakit Avian Influenza (AI) dan Pengembangan Usaha Peternakan Lokal di Kabupaten Biak Numfor.

### **3.3. Peran Sebagai Fasilitator**

Menurut Arsyad dalam Subandi (2011:119-120), Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, yaitu pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator untuk dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sektor peternakan ayam petelur yang efektif dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup berbagai fasilitas pendukung yang mendukung kelancaran operasional peternakan, seperti ketersediaan kandang yang layak, penyediaan pakan

berkualitas serta akses terhadap peralatan peternakan. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor berperan penting dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peternak dapat terpenuhi melalui program-program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

### **1. Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Jalannya peran dinas dalam mendukung pengembangan usaha peternakan ayam petelur dilakukan dengan upaya memberikan bantuan sarana produksi yaitu berupa pemberian bibit ayam petelur, pakan, kandang, vaksin serta obat-obatan. Upaya dinas yaitu mendistribusikan bantuan sarana produksi tersebut secara merata kepada kelompok peternak yang telah mengikuti pelatihan peternakan ayam petelur. Dinas Peternakan Kabupaten Biak Numfor telah memberikan dukungan yang signifikan kepada peternak ayam petelur dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana produksi yang memadai sehingga peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola peternakan, sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas telur ayam petelur.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, peternak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas telur lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar. Sebagai contoh, kandang yang baik akan mendukung kesehatan ayam, pakan yang tepat dapat mempercepat proses produksi telur. Penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi investasi jangka panjang yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Oleh karena itu, modal sarana dan prasarana yang tepat bukan hanya sekedar fasilitas fisik, tetapi juga merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

### **2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan**

Peningkatan kapasitas peternak melalui pelatihan dan pendampingan adalah salah satu strategi yang krusial dalam pengembangan sektor peternakan, terutama dalam usaha peternakan ayam petelur. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peternak dalam mengelola usaha ternak mereka secara lebih profesional dan efisien. Pelatihan peternakan, bantuan sarana dan prasarana peternakan, serta penyuluhan dan pendampingan di lapangan telah memberikan dampak yang signifikan bagi peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor. Pelatihan peternakan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola peternakan yang lebih efektif dan efisien. Bantuan sarana dan prasarana peternakan telah memperlancar kegiatan peternakan dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, penyuluhan dan pendampingan di lapangan telah membantu peternak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola peternakan. Dengan adanya ketiga program ini, diharapkan peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan produksi telur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

### **3.4. Peran Sebagai Stimulator**

Menurut Arsyad dalam Subandi (2011:119-120), Stimulator yaitu pemerintah daerah bergerak sebagai pendorong bagi penciptaan serta pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah. Dalam konteks pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai stimulator sangat penting untuk meningkatkan produksi telur yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan sebagai stimulator dalam pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

## 1. Pemberian Insentif dan Kemudahan

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas untuk mendorong perkembangan usaha peternakan ayam petelur adalah dengan memberikan insentif atau kemudahan kepada peternak. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan peternak, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha peternakan yang lebih efektif dan efisien.

Pemberian insentif yang tepat akan meningkatkan motivasi peternak untuk mengembangkan usahanya. Misalnya, dengan adanya bantuan modal, peternak dapat mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk memperluas usaha atau memperbaiki sarana dan prasarana peternakan mereka, seperti kandang atau peralatan pemeliharaan. Selain itu, insentif dalam bentuk subsidi pakan dan bibit unggul dapat membantu peternak menekan biaya produksi, sehingga margin keuntungan mereka menjadi lebih besar. Hal ini akan meningkatkan keberlanjutan usaha peternakan dan mendorong peternak untuk lebih serius dalam menjalankan usahanya. Adapun bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan Ayam Petelur**  
**Kabupaten Numfor Tahun 2023**

| No | Jenis Bantuan                         | Jumlah Penerima | Jumlah Bantuan |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Bibit Ternak Ayam Petelur Fase Pullet | 61 Peternak     | 15.000 Ekor    |
| 2  | Pakan Ternak Ayam Petelur             | 62 Peternak     | 1.230 Zak      |
| 3  | Kandang Baterai Galvanis 4 Pintu      | 40 Peternak     | 1.038 Kandang  |

Sumber: LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa puluhan peternak telah menerima berbagai bentuk bantuan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi dan kualitas hasil ternak. Selain itu, kehadiran klinik konsultasi gratis setiap hari kerja menjadi fasilitas penting yang membantu peternak mengatasi berbagai tantangan teknis di lapangan. Dengan dukungan ini, iklim usaha peternakan di Kabupaten Biak Numfor menjadi lebih kondusif, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat peternak.

## 2. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor terlihat dari dukungan nyata yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Bantuan berupa pelatihan, sarana prasarana, dan pendampingan teknis telah menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, terutama peternak pemula dan Orang Asli Papua (OAP), untuk memulai usaha peternakan ayam petelur. Dukungan ini membuat masyarakat merasa tidak sendiri, karena didampingi langsung dalam prosesnya.

Salah satu contoh kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas adalah kebijakan pintu terbuka, yang memungkinkan peternak untuk mengakses dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan tanpa harus membuat janji terlebih dahulu. Dengan demikian, peternak dapat lebih mudah dalam mengakses dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha peternakan mereka. Dalam mengembangkan peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, dibentuk juga asosiasi peternak unggas yang berperan penting sebagai wadah untuk menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan peternak. Asosiasi peternak juga berperan sebagai perantara antara peternak dan pemerintah, serta sebagai sumber informasi dan dukungan bagi peternak. Selain itu, Dinas juga dapat mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi peternak pemula untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha peternakan. Program bantuan sarana dan prasarana

peternakan juga dapat diberikan untuk membantu peternak meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi usaha mereka.

### **3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Biak Numfor**

#### **1. Faktor Pendukung**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengembangkan ekonomi lokal, dinas telah berperan aktif dalam mengembangkan peternakan ayam petelur di Biak Numfor. Faktor-faktor pendukung seperti kemampuan pegawai, dana yang cukup, dan pemantauan serta evaluasi program, serta bantuan peternakan yang diberikan kepada peternak, telah memungkinkan program tersebut berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peternak dan masyarakat di Biak Numfor. Peran Asosiasi Peternakan Unggas dan peternak ayam petelur juga sangat penting dalam mendukung pengembangan peternakan ayam petelur di Biak Numfor. Asosiasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan peternak, serta sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan peternak. Dengan demikian, Asosiasi Peternakan Unggas dan peternak ayam petelur dapat berperan sebagai mitra Dinas dalam mengembangkan peternakan ayam petelur di Biak Numfor

#### **2. Faktor Penghambat**

Pengembangan peternakan ayam petelur di Biak Numfor menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Faktor-faktor penghambat seperti ketergantungan pada pakan impor, kondisi geografis kepulauan, ketidakpastian harga telur, keterbatasan akses pasar, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas peternakan, semua ini mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan usaha peternakan ayam petelur di daerah tersebut. Hambatan-hambatan di atas bisa terjadi karena kondisi geografis Kabupaten Biak Numfor yang terletak di wilayah timur Indonesia menyebabkan tingginya biaya distribusi dan logistik, sehingga harga pakan menjadi sangat mahal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Tidak hanya itu, kapasitas masyarakat lokal dalam memproduksi pakan secara mandiri masih sangat terbatas. Mayoritas peternak belum memiliki pengetahuan teknis maupun keterampilan yang memadai dalam merancang formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam petelur. Hal ini diperparah dengan belum tersedianya teknologi modern dalam proses pembuatan pakan, baik dari segi peralatan maupun sistem produksi yang efisien dan berkualitas.

### **3.5 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat**

Dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan peternakan ayam petelur, diperlukan upaya yang strategis dan terkoordinasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak untuk dapat membantu mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor. Pengembangan peternakan ayam petelur di Biak Numfor tidak hanya memerlukan upaya dari dinas saja, tetapi juga memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan peternakan ayam petelur dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Peran asosiasi peternak juga sangat penting dalam mengatasi hambatan pengembangan peternakan ayam petelur. Asosiasi peternak dapat berperan sebagai wadah untuk menghimpun dan mengorganisir peternak, serta menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan peternak. Peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor telah berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha peternakan melalui berbagai cara, seperti bergabung dalam kelompok peternak, mencari solusi untuk masalah pakan, dan mengikuti pelatihan. Namun, mereka masih membutuhkan dukungan dan bantuan dari dinas untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena

itu, perlu adanya kerja sama yang efektif antara peternak, Dinas Pertanian, dan pihak lainnya untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana peternakan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan peternak ayam petelur. Bantuan tersebut memberikan motivasi dan mendukung proses beternak yang lebih optimal. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa belum adanya regulasi yang kuat sebagai dasar kegiatan peternakan, serta hambatan dalam distribusi bantuan yang menyebabkan pengembangan peternakan belum berjalan maksimal. Sama halnya dengan temuan Rahmawati, et al (2016), penelitian ini menegaskan bahwa dukungan dari aktor eksternal seperti pemerintah atau penyuluh berperan penting dalam pemberdayaan peternak ayam petelur. Dukungan ini mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian peternak. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Ahmad, et al (2023) yang menunjukkan bahwa strategi kerja sama dan dukungan kelembagaan, seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan pengembangan pasar, dapat mendorong peningkatan produksi dan kualitas telur. Sama halnya dengan temuan Djamaluddin, et al (2020), penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meskipun penelitian ini lebih lanjut menyoroti aspek kelembagaan yang masih lemah, terutama tidak adanya regulasi yang memayungi kegiatan peternakan secara formal. Dengan demikian, dukungan pemerintah di kedua studi sama-sama dianggap penting, namun pada konteks yang berbeda: kebijakan yang proaktif dalam penelitian Djamaluddin, dan hambatan regulatif dalam penelitian ini.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Onono, et al (2018) karena keduanya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan. Jika Onono menyoroti permasalahan teknis seperti kualitas pakan, keterbatasan lahan, dan penyakit, maka penelitian ini menambahkan dimensi kelembagaan, yaitu ketiadaan regulasi serta persoalan teknis dalam pendistribusian bantuan. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem peternakan ayam petelur rentan terhadap berbagai kendala dan memerlukan dukungan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan dan penyuluhan. Berbeda dengan penelitian Lestari & Maimunah (2023) yang lebih fokus pada faktor internal peternakan seperti jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan luas kandang sebagai variabel yang signifikan dalam peningkatan produksi, penelitian ini menempatkan peran pemerintah sebagai elemen eksternal yang mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan peternak secara lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan usaha peternakan dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada manajemen internal, tetapi juga dukungan dari institusi formal. Berbeda pula dengan penelitian Suwannasri, et al (2022) yang menggambarkan keberhasilan peternakan jangka panjang berbasis kemandirian lokal, praktik berkelanjutan, dan dukungan konsumen, penelitian ini justru menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peran pemerintah. Keberhasilan peternak di Ban Klang muncul dari pengelolaan lokal yang kuat dan hubungan pasar yang stabil, sementara dalam konteks penelitian ini, lemahnya regulasi dan distribusi bantuan menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha peternakan ayam petelur secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa konteks lokal, peran aktor eksternal, serta kekuatan kelembagaan menjadi faktor penting yang membedakan keberhasilan atau stagnasi usaha peternakan ayam petelur di berbagai wilayah.

Anggraini et al. (2022) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu, stabilitas harga, dan hubungan sosial dalam kelompok tani. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini yang menyoroti pentingnya intervensi pemerintah, terutama dalam aspek penyediaan sarana prasarana dan penguatan regulasi. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi struktural berupa lemahnya dasar hukum yang secara eksplisit belum banyak dibahas dalam studi Anggraini. Selanjutnya, Pingali & Rosegrant (1995) menjelaskan bahwa transisi dari pertanian

subsisten ke arah komersialisasi seperti peternakan ayam merupakan proses yang kompleks dan sering disertai ketimpangan serta dampak lingkungan. Penelitian ini menambah sudut pandang tersebut dengan memberikan gambaran mikro bagaimana absennya regulasi dan distribusi bantuan yang belum optimal menghambat komersialisasi yang adil dan berkelanjutan di tingkat peternak kecil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas dinamika pasar seperti yang dijelaskan Pingali, tetapi juga menekankan pentingnya instrumen kelembagaan sebagai fondasi komersialisasi peternakan. Sementara itu, Wong et al. (2017) menyoroti peran penting peternakan unggas skala kecil dalam menunjang ketahanan pangan rumah tangga, terutama di daerah miskin. Namun, studi mereka juga menyoroti kendala teknis seperti penyakit dan keamanan hayati yang rendah. Penelitian ini menambahkan dimensi kebijakan dan kelembagaan sebagai faktor yang turut menentukan efektivitas sistem peternakan kecil. Dalam konteks ini, pendekatan teknis yang disarankan Wong hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan distribusi bantuan yang tepat dan keberadaan regulasi yang kuat.

Pendekatan multidimensional yang diusulkan oleh Vaarst et al. (2015), yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, sangat relevan dengan temuan penelitian ini. Meskipun penelitian ini lebih menekankan pada dimensi kelembagaan dan kesejahteraan ekonomi peternak, terdapat kesamaan bahwa keberlanjutan usaha tidak bisa dilepaskan dari kerangka regulasi dan dukungan pemerintah yang sistematis. Penelitian ini turut memperkuat gagasan bahwa produksi unggas yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan bukan semata-mata praktik teknis di lapangan. Hasil studi Elahi et al. (2024) di China menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang terstruktur dapat menurunkan emisi dari sektor peternakan, namun harus dibarengi dengan efisiensi produksi dan restrukturisasi industri. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi dengan konteks Indonesia, di mana efektivitas bantuan peternakan belum diiringi dengan kebijakan komprehensif yang menjamin efisiensi dan keberlanjutan. Jika China mampu mengaitkan kebijakan dengan hasil kuantitatif berupa penurunan emisi, maka penelitian ini menunjukkan bahwa di tingkat lokal, bantuan yang tidak terdistribusi merata justru menurunkan efektivitas program pemberdayaan. Dalam konteks keberagaman lokal dan adaptasi, Bettridge et al. (2018) menekankan bahwa pengembangan ayam kampung harus memperhitungkan faktor-faktor budaya, genetik, dan ekologi. Penelitian ini mengkonfirmasi pentingnya mempertimbangkan konteks lokal, namun tidak fokus pada aspek genetik, melainkan lebih pada konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa pengembangan peternakan tidak bisa diseragamkan dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan, baik dari sisi teknis maupun dari struktur pendukungnya. Henderson (2005) dalam studinya mengenai konflik penggunaan lahan di Australia menemukan bahwa regulasi tata ruang yang tidak efektif menghambat relokasi peternakan unggas. Hal ini memiliki kesamaan dengan temuan penelitian ini, di mana tidak adanya regulasi formal dalam mendukung kegiatan peternakan menghambat perkembangan usaha. Meski konteksnya berbeda—yakni konflik dengan ekspansi urban di Australia dan lemahnya dukungan kelembagaan di Indonesia—keduanya menegaskan bahwa tanpa kerangka regulasi yang jelas, keberlanjutan peternakan unggas sulit dicapai. Kumar et al. (2021) menunjukkan bahwa peternakan unggas pekarangan memberikan dampak positif terhadap ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, tetapi menghadapi tantangan dalam bentuk kurangnya pengetahuan teknis dan fluktuasi harga pakan. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menambahkan bahwa selain aspek teknis, keberhasilan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi dan bantuan disalurkan. Dengan demikian, solusi atas permasalahan di tingkat rumah tangga tidak cukup hanya melalui pelatihan teknis, tetapi juga menuntut reformasi kelembagaan dan penguatan dukungan kebijakan.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penelitian lanjutan dapat fokus pada efektivitas bantuan pemerintah dalam jangka panjang terhadap kemandirian peternak serta pentingnya pengembangan regulasi lokal yang mendukung

pengelolaan usaha peternakan secara berkelanjutan. Selain itu, perbandingan antara model pemberdayaan melalui intervensi pemerintah dan kemandirian peternak secara lokal menjadi topik menarik untuk menggali pendekatan paling efektif. Peran kelembagaan non-pemerintah, seperti asosiasi peternak dan sektor swasta, juga perlu dikaji sebagai pelengkap dukungan pemerintah. Selanjutnya, kesiapan peternak dalam menghadapi tantangan biosekuriti dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan manajemen usaha, merupakan aspek penting yang perlu diteliti lebih mendalam guna mendukung pengembangan peternakan ayam petelur secara menyeluruh.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa peran dinas pemerintah dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana sangat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan dan motivasi peternak ayam petelur. Namun, keberhasilan pengembangan usaha masih terbatas oleh ketiadaan regulasi yang kuat dan kendala dalam pelaksanaan bantuan tersebut. Temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dan peran aktor eksternal dalam pemberdayaan peternak, serta tantangan yang dihadapi dari aspek teknis dan manajerial. Perbedaan konteks antara wilayah yang mengandalkan kemandirian lokal dan yang bergantung pada intervensi pemerintah menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Secara keseluruhan, dukungan kelembagaan yang terstruktur dan regulasi yang jelas menjadi kunci untuk mendorong pengembangan peternakan ayam petelur yang berkelanjutan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan karakteristik objek penelitian yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah lain dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari bantuan pemerintah dan peran regulasi masih terbatas, karena data yang tersedia lebih berfokus pada aspek kuantitatif dan persepsi peternak dalam waktu relatif singkat. Faktor eksternal seperti pengaruh pasar, iklim bisnis, dan keterlibatan sektor swasta juga kurang mendapat perhatian dalam penelitian ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, sehingga disarankan dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kegiatan peternakan ayam petelur masyarakat, untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada efektivitas jangka panjang bantuan pemerintah dan pengembangan regulasi lokal yang mendukung keberlanjutan peternakan. Selain itu, studi komparatif antara model pemberdayaan pemerintah dan kemandirian lokal, peran asosiasi dan sektor swasta, kesiapan peternak terhadap biosekuriti, serta pemanfaatan teknologi digital perlu dieksplorasi lebih lanjut guna mendukung pengelolaan usaha peternakan yang lebih efektif.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Nuddin, A., & Toaha, S. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian, Vol 8, No.*
- Alarcon, P., Fèvre, E. M., Muinde, P., Murungi, M. K., Kiambi, S., Akoko, J., & Rushton, J. (2017). Urban Livestock Keeping in the City of Nairobi: Diversity of Production Systems, Supply Chains, and Their Disease Management and Risks. *Frontiers in Veterinary Science, 4*. <https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00171>
- Anang, H., & Kadir, S. (2025). Analysis of Production Function in Layer Chicken Business in Soppeng District. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 211–218*. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1439>
- Anggraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 72–92*. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2525>
- Bettridge, J. M., Psifidi, A., Terfa, Z. G., Desta, T. T., Lozano-Jaramillo, M., Dessie, T., Kaiser, P., Wigley, P., Hanotte, O., & Christley, R. M. (2018). The role of local adaptation in sustainable production of village chickens. *Nature Sustainability, 1(10), 574–582*. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0150-9>
- Djamaluddin, A., Asriadi, A. R., & Abdullahi, A. B. (2020). The policy of Tanete Village government to create conducive laying chicken farm business climate. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 492(1), 012115*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/492/1/012115>
- Elahi, E., Li, G., Han, X., Zhu, W., Liu, Y., Cheng, A., & Yang, Y. (2024). Decoupling livestock and poultry pollution emissions from industrial development: A step towards reducing environmental emissions. *Journal of Environmental Management, 350, 119654*. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119654>
- Henderson, S. R. (2005). Managing land-use conflict around urban centres: Australian poultry farmer attitudes towards relocation. *Applied Geography, 25(2), 97–119*. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.03.001>
- Lestari, D., & Maimunah, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Journal on Education, 6(1)*.

- Kumar, M., Dahiya, S. P., & Ratwan, P. (2021). Backyard poultry farming in India: A tool for nutritional security and women empowerment. *Biological Rhythm Research*, 52(10), 1476–1491. <https://doi.org/10.1080/09291016.2019.1628396>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Onono, J. O., Alarcon, P., Karani, M., Muinde, P., Akoko, J. M., Maud, C., Fevre, E. M., Häsler, B., & Rushton, J. (2018). Identification of production challenges and benefits using value chain mapping of egg food systems in Nairobi, Kenya. *Agricultural Systems*, 159, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.10.001>
- Pingali, P. L., & Rosegrant, M. W. (1995). Agricultural commercialization and diversification: processes and policies. *Food Policy*, 20(3), 171–185. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(95\)00012-4](https://doi.org/10.1016/0306-9192(95)00012-4)
- Rahmawati, I. R., Muksin, M., & Rizal, R. (2016). Peran dan Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan Peternak Ayam Petelur di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, 12(2), 183. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.12252>
- Silondae, H., Muzayyanah, M. A. U., Sulastri, E., & Guntoro, B. (2022). The Role of Household-Scale Local Chicken Farms in Providing Family Food in Minahasa Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012009>
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif (Edisi Kedua). CV. ALfabeta.
- Subandi. (2011). Sistem Ekonomi Indonesia. CV. ALfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua). CV. ALfabeta.
- Sumiati, Fadilah, R., Darmawan, A., & Nadia, R. (2025). — Invited Review — Challenges and constraints to the sustainability of poultry farming in Indonesia. *Animal Bioscience*, 38(4), 802–817. <https://doi.org/10.5713/ab.24.0678>
- Suwannasri, M., & Promphakping, B. (2022). Sustainability of Smallholders in the Local Food System: A Study of Chicken Layer Farms in Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand. *Sustainability*, 14(10), 5997. <https://doi.org/10.3390/su14105997>
- Vaarst, M., Steinfeldt, S., & Horsted, K. (2015). Sustainable development perspectives of poultry production. *World's Poultry Science Journal*, 71(4), 609–620. <https://doi.org/10.1017/S0043933915002433>

Wong, J. T., de Bruyn, J., Bagnol, B., Grieve, H., Li, M., Pym, R., & Alders, R. G. (2017). Small-scale poultry and food security in resource-poor settings: A review. *Global Food Security*, 15, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.04.003>

